

CASCADING KINERJA

Tujuan : Meningkatkan kompetensi, produktivitas dan penempatan tenaga kerja dan penempatan transmigrasi serta fungsi sarana-sarana HI

Indikator Kinerja : Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui sektor formal dan mekanisme layanan antar kerja

Sasaran strategis 1 : Meningkatnya jumlah pencari kerja yang dilatih berdasarkan klaster kompetensi dan meningkatnya produktivitas tenaga kerja

Indikator Kinerja : Persentase tenaga kerja siap kerja

Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja

Persentase Pencari Kerja yang dilatih (target: ...)

Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi

Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi

Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina

Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja

Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi perizinan)

Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan

Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas (target: 1 perusahaan)

Sasaran strategis 2 : Meningkatnya jumlah pencari kerja yang siap kerja dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensi yang sesuai dengan dunia industri dan dunia usaha

Indikator Kinerja : Tingkat Partisipasi angkatan Kerja

Program Penempatan Tenaga Kerja

Persentase peningkatan tenaga kerja yang ditempatkan

Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/ Kota

Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan melalui mekanisme Pelayanan Antar Kerja baik AKL, AKAD, dan perluasan Kesempatan kerja

Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang dilayani Melalui Sistem Online (Aplikasi yokerjo.jepara.go.id)

Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah CPMI/PMI yang dilayani pra dan purna penempatan

Sasaran strategis 3 Meningkatnya jumlah dan fungsi sarana-sarana HI di perusahaan

Indikator Kinerja : persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur skala upah dan terdaftar bpjs ketenagakerjaan)

Program Hubungan Industrial

Persentase penyelesaian PHI/ PHK melalui tripartit

Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur skala upah dan terdaftar bpjs ketenagakerjaan

Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah perkara perselisihan yang dicegah dan terselesaikan

Sasaran strategis 4: Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai program transmigrasi

Indikator Kinerja : Jumlah masyarakat yang berminat ikut program transmigrasi

Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Rasio peningkatan jumlah transmigran

Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah KK yang diberangkatkan

Tujuan 2: Meningkatnya jumlah koperasi sehat dan pertumbuhan usaha mikro yang berkualitas

Indikator kinerja : Meningkatnya koperasi yang berkualitas



Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan penerapan Regulasi Perkoperasian dan pelaksanaan SOM dan SOP koperasi

Indikator : Persentase koperasi aktif



Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Persentase Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Daerah/Kabupaten

Jumlah pemutakhiran data koperasi

Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Persentase Koperasi sehat

Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota

Jumlah koperasi sehat

Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Persentase Pengurus, pengawas dan anggota koperasi yang berkualitas

Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota

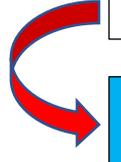
Jumlah Pengurus, Pengawas, Pengelola dan anggota koperasi yang memahami pengetahuan koperasi

Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Persentase Koperasi yang mandiri dari struktur modal sendiri (target :

Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Koperasi yang mandiri dari struktur modal sendiri



Tujuan 2: Meningkatnya jumlah koperasi sehat dan pertumbuhan usaha mikro yang berkualitas

Indikator kinerja : Persentase usaha mikro dan kecil

Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan UMKM berdaya saing dan berkualitas

Indikator : Persentase unit usaha yang berdaya saing

Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

Persentase unit usaha yang teridentifikasi potensi, berijin, dan mandiri pembiayaan dan pemasaran

Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

Jumlah usaha mikro yang produktif berijin, yang mengakses pembiayaan dan pemasaran

Program Pengembangan UMKM

Persentase unit usaha yang berkembang ke arah mandiri

Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

Jumlah Usaha mikro yang naik kelas

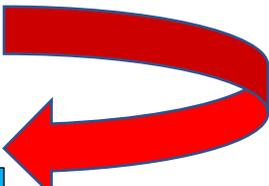
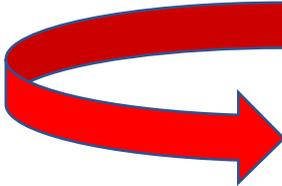
Tujuan 3: Meningkatkan kualitas pelayanan PD
Indikator: Nilai SKM PD



Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya kualitas pelayanan PD
Indikator: Persentase capaian kinerja PD yang mencapai target



Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
Indikator: Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran



- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang tersusun
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
Jumlah dokumen administrasi kepegawaian PD yang tersusun
- Administrasi Umum Perangkat Daerah**
Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun

- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
Jumlah Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara

